



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Nomor : 0315/P.01/01/2013
Lampiran : 1 Berkas
Hal : **Penawaran Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)**

17 Januari 2013

Yth.

4. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota
5. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota
6. Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota

di
Tempat

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pendidikan dan Pelatihan **Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)**, bersama ini kami informasikan bahwa kami membuka kembali pendaftaran diklat PPD, dengan informasi sebagai berikut:

4. Diklat akan dilaksanakan selama 30 hari sebanyak 2 angkatan, dalam kurun waktu tentative antara bulan Mei dan Juni (kepastian jadwal pelaksanaan dan institusi pelaksana diklat akan kami unggah pada laman Pusbindiklatren).
5. Persyaratan calon peserta adalah :
 - a. PNS;
 - b. Masa kerja minimal 2 tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - c. Pendidikan minimal S1;
 - d. Umur setinggi-tingginya 5 tahun sebelum pensiun;
 - e. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon II atasan langsungnya;
 - f. Mengisi Formulir Pendaftaran dan pernyataan kesediaan *cost-sharing* terlampir.
6. Materidiklat dan rincian informasi lainnya dapat dilihat pada lampiran.

Jika diklat PPD yang kami tawarkan ini sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas instansi Saudara, usulan peserta dapat disampaikan kepada kami **paling lambat tanggal 28 Maret 2013**, dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi staf kami Sdr. Wiky Witarni/Karyoto/Mulyani Rachmiati/Ch. Nunik Ispriyanti di No. Telp. (021) 31931447.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan
dan Pelatihan Perencana

Ir. Yahya Rachmana Hidayat, M.Sc, Ph.D
NIP 19620323 198903 1 003

Tembusan :

3. Bapak Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas (sebagai laporan);
4. PPK Dukungan Manajemen IV Sesmeneg PPN/Settama Bappenas.

PUSBINDIKLATREN BAPPENAS
FORMULIR PENDAFTARAN CALON PESERTA BEASISWA NON GELAR
DALAM NEGERI

1. Nama (sesuai ijazah terakhir):..... NIP:
2. Tempat/tanggal lahir : Jenis Kelamin (L/ P).....
3. Alamat rumah :
Kab/Kota/Prov Kode Pos
Telpon/Fax/HP (.....)
4. e-mail address :
5. Nama instansi asal :
6. Nama Unit Kerja :
7. Alamat Unit Kerja :
Kab/Kota/Prov..... Kode Pos
Telpon/Fax/HP (.....)
8. Jabatan sekarang : Gol :
9. TMT PNS 100%, pada Gol. III/a :/...../..... Masa kerja:
10. Pendidikan Terakhir : S1 / S2 / S3 PT :
Fakultas (S1/S2/S3) : Jurusan:
Lulus tahun (S1/S2/S3) : IPK: skala:
11. Apakah sedang mengikuti /dalam proses pelamaran program diklat Pusbindiklatren? : Ya/Tidak
12. Pilihan diklat yang akan diikuti :
.....
.....
13. Uraikan secara singkat tugas pekerjaan Saudara sehari-hari saat ini :
.....
.....

Dengan ini kami menyatakan bahwa, informasi di atas adalah yang sebenarnya. Jika dikemudian hari diketahui ada informasi yang tidak benar, maka kami bersedia menerima segala sanksi yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren.

Menyetujui,
Pejabat Eselon II :

..... tgl 20
Yang bersangkutan,

ttd
(.....)
Nama Jelas

ttd
(.....)
Nama Jelas

KOP INSTANSI
(Surat Kesiediaan *Cost-Sharing*)

(tempat/tgl/bln/thn)

Nomor :
Lamp. :(berkas)
Hal : Kesiediaan Pembiayaan Diklat
a.n. 1. Sdr. X
2. Sdr. Y
3. Sdr. Z

Yth. Sdr. Kapusbindiklatren Bappenas
Di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Kapusbindiklatren Bappenas, nomor/...../2013, tentang ketentuan pembiayaan *cost sharing* untuk program non gelar dalam negeri yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas, bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr. X, Y, dan Z dengan pengaturan biaya sebagai berikut:

No	Nama Peserta	Item Mandatory	(dalam Rp)	Item Voluntary	(dalam Rp)	(Total Rp)
1	X					
2	Y					
3	Z					

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

.....,

(.....)

NIP:

Tembusan :

1. Gubernur/Bupati/Walikota.....;
2. Penyelenggara Diklat;
3. Sesmen PPN/Sestama Bappenas;
4. Peserta diklat yang bersangkutan.

Catatan:

Mandatory : adalah porsi pendanaan yang menjadi **kewajiban** instansi asal berupa:

- a. Transport kedatangan dan kepulangan ke lokasi studi;
- b. Uang saku.

Voluntary : adalah porsi pendanaan yang secara **sukarela** ditanggung oleh instansi asal.

KURIKULUM DIKLAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD)

I. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya, terdapat tiga aspek penting di dalam manajemen pembangunan nasional, yaitu sisi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ketiga aspek ini saling mendukung satu sama lainnya. Pada sisi perencanaan, perkuatan perlu dilakukan dari sisi proses penyusunan perencanaan, kapasitas kelembagaan, serta ketersediaan dan kapasitas data dan statistik. Dari sisi proses perencanaan, untuk mewujudkan rencana pembangunan nasional yang baik, maka perlu adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, serta antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut diatas, maka perlu upaya untuk peningkatan kapasitas SDM, khususnya SDM perencana di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Salah satu strateginya adalah dengan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penyusunan Dokumen Perencanaan.

II. TUJUAN UMUM PELATIHAN

Pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan serta ketrampilan staf perencana dalam menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

III. TUJUAN KHUSUS PELATIHAN

Sedangkan tujuan khusus dari pendidikan dan pelatihan ini diantaranya adalah:

- Meningkatkan pengertian dan pemahaman peserta tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
- Meningkatkan pengertian dan pemahaman peserta tentang proses penyusunan dokumen perencanaan.
- Agar peserta mampu menyusun dokumen perencanaan.
- Agar peserta mampu mengevaluasi dokumen perencanaan.
- Agar dapat mensinergikan/mengintegrasikan/mensinkronisasikan perencanaan daerah dengan perencanaan pusat (RPJMD dengan RPJMN).

IV. KELUARAN (*OUTPUT*) PELATIHAN

Keluaran (*Output*) yang diharapkan dari penyelenggaraan diklat PPD adalah peserta terlatih dan mampu menyusun kerangka rancangan dokumen perencanaan (RPJMD dan Renstra SKPD).

V. KRITERIA PENENTUAN PESERTA

- Pendidikan minimal S1
- Masa Kerja minimal 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Umur maksimal 5 (lima) tahun sebelum memasuki masa pensiun
- Perencana atau pegawai negeri sipil (PNS) yang menangani perencanaan dari Provinsi (Bappeda, Dinas dan DPRD)
- Perencana atau pegawai negeri sipil (PNS) yang menangani perencanaan dari Kabupaten/Kota.

VI. METODE PELATIHAN

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai program diklat ini, maka metode diklat yang akan digunakan adalah proses belajar mengajar dengan metode pembelajaran untuk orang dewasa yang dapat terdiri dari: penyajian makalah, diskusi kelas, diskusi kelompok, praktek kerja dan presentasi, serta field trip, dengan perbandingan 20% teori dan 80% praktek.

VII. KURIKULUM

1. Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Perencanaan Proyek
 - c. Kebijakan Program, Pembiayaan dan Penganggaran
 - d. Permasalahan dalam Perencanaan, Implementasi, Kegagalan Rencana dan Government Failure
2. Analisis Potensi dan Kebutuhan Daerah
 - a. Analisis PDRB
 - b. Sumber Daya Daerah
 - c. Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi Daerah
 - d. Hubungan antar Daerah
 - e. Globalisasi dan Dampaknya terhadap Pembangunan Daerah
 - f. Tata Ruang Wilayah dan Kota
 - g. Local Economic Development
 - h. Analisis Potensi dan Kebutuhan Daerah
3. Beberapa Indikator dan Teknik Perencanaan Makro Daerah
 - a. Landasan Kuantitatif dalam Perencanaan

- b. Analytical Hierarchy Process
 - c. Elastisitas dan Kegunaannya dalam Perencanaan
 - d. Indikator Pembangunan Daerah
 - e. Participatory Rural Appraisal
 - f. Pengantar Model Makro Ekonomi Daerah dan Proyeksi Ekonomi Daerah
4. Perencanaan Sektor dan Regional
 - a. Perencanaan Sektor
 - b. Perencanaan Regional
 5. Studi Lapangan dan Latihan

IX. KEHADIRAN PESERTA

Tingkat kehadiran peserta dalam diklat Perencanaan Pembangunan Daerah ini adalah minimal 90%, apabila kurang dari 90% maka peserta dinyatakan tidak lulus.

VIII.LAMA PELATIHAN

- a. Lama pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) adalah 4 minggu atau 30 hari, dengan hari efektif selama 22 hari kerja.
- b. 1 (satu) sesi = 2 jam pelajaran (jampel), 1 (satu) jampel = 45 menit.

IX. METODE EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh pelaksana diklat dan harus disampaikan kepada Pusbindiklatren-Bappenas selambat-lambatnya 1 minggu setelah selesai pelatihan. Evaluasi mencakup: evaluasi terhadap kinerja pengajar, evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan diklat, dan evaluasi terhadap kesesuaian dan kualitas materi pelatihan.

X. PROSES PELAMARAN

Pengiriman nama calon peserta diklat PPD, mohon melampirkan formulir pendaftaran yang bertandatangan asli. Surat usulan, formulir dan dokumen pendukung disampaikan langsung/via pos ke Kapusbindiklatren Bappenas, dengan alamat Jl. Sunda Kelapa No. 9, Jakarta Pusat (10310).

Untuk keterangan lebih lanjut dalam pengusulan calon peserta dapat diunduh melalui email: pusbindiklatren@bappenas.go.id atau membuka situs: www.Pusbindiklatren.bappenas.go.id.